

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia berperan penting. PNS tidak hanya berperan sebagai pegawai pemerintahan, tetapi juga sebagai salah satu komponen utama dalam aparatur negara yang turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor kehidupan Masyarakat. Guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional yang telah disebutkan, dibutuhkan pegawai negeri yang setia dan taat terhadap Pancasila, UUD 1945, negara, serta pemerintahan. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki kualitas yang tinggi dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai aparatur negara (Samba'a *et al.*, 2018). Untuk memastikan keberlangsungan peran penting Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan, proses rekrutmen melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi tahapan yang paling penting dan memiliki risiko tinggi dalam keseluruhan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia (Simanungkalit, 2008). Proses pengadaan CPNS dianggap beresiko karena memiliki dampak jangka panjang terhadap investasi aset di masa depan. Pengelolaan yang tepat diperlukan karena kinerja mereka berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu jalur utama bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja di lingkungan pemerintahan dan instansi negara, oleh karena itu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi salah satu momen yang paling diminati oleh masyarakat, terutama oleh para lulusan baru (*fresh graduate*) dan alumni dari jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi di seluruh Indonesia (Junata, 2017). Penerimaan CPNS di Indonesia diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang setiap tahunnya membuka lowongan bagi berbagai posisi strategis di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Seleksi CPNS dilakukan melalui beberapa tahap yang ketat, dimulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, hingga ujian kompetensi yang mencakup Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Sistem seleksi CPNS telah mengalami banyak reformasi, terutama dengan diadopsinya teknologi digital dalam proses pendaftaran dan ujian, yang bertujuan untuk mengurangi risiko dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Simanungkalit, 2008).

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor administrasi pemerintah. Pemerintah Indonesia terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital guna mendukung proses birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan (Soraya *et al.*, 2023). Salah satu aspek penting dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital adalah penerapan e-meterai dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Tanjung, 2023). Penerapan e-meterai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021

tentang E-Meterai. Peraturan ini mengatur tentang penggunaan, fungsi, dan cara penerapan meterai elektronik dalam berbagai transaksi dokumen. Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat, disimpan, dan/atau dikirim melalui sistem elektronik dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah. E-meterai memberikan sejumlah manfaat, seperti berkontribusi sebagai sumber pendapatan negara yang mendukung perekonomian, memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam proses pembubuhan meterai, serta mengurangi risiko penipuan dan pemalsuan (Tanjung, 2023).

Penerapan kebijakan e-meterai dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal pemahaman dan penerimaan dari Masyarakat. Kebijakan ini menuai beragam respon positif maupun negatif dari masyarakat di berbagai media sosial, salah satunya adalah media sosial *Twitter/X*. *Twitter/X* merupakan salah satu *platform* media sosial yang merepresentasikan media baru (*New Media*), yang menyajikan topik-topik seputar peristiwa terkini serta isu yang sedang menjadi perbincangan publik. Fungsi utama *Twitter/X* adalah menyediakan ruang bagi publik untuk berinteraksi dan berdiskusi (Aisha & Bahalwan, 2024). Dilansir dari Katadata, Indonesia menduduki peringkat keempat pengguna *Twitter/X* terbanyak di dunia dengan jumlah 27,5 juta pengguna. *Twitter/X* menjadi salah satu media sosial yang datanya telah banyak digunakan untuk berbagai kajian sosial, seperti analisis sentimen publik. Hal ini karena *Twitter/X* memudahkan penggunaanya dalam mengakses, membuat, dan

mengumpulkan data yang berisi informasi terkait waktu dan tempat (Hernandez-Suarez *et al.*, 2019).

Masyarakat yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengunggah ribuan komentar dan pendapat di media sosial *Twitter/X* setelah kebijakan e-meterai diterapkan. Beberapa *tweet* berisi pesan positif yang mendukung kebijakan ini dan memuji kemudahan yang ditawarkan dalam proses digitalisasi administrasi. Namun, tidak sedikit *tweet* yang mengandung makna negatif, seperti keluhan karena portal pembelian e-meterai yang tidak bisa diakses, dan sejumlah pengguna yang telah membeli dan membayar e-meterai, namun tidak dapat membubuhkannya pada dokumen mereka karena mengalami berbagai kendala teknis. Hal tersebut dianggap menghambat proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan juga menyebabkan kerugian finansial, karena uang yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan layanan yang diharapkan dan proses administrasi pun terhambat. Analisis sentimen juga dapat digunakan untuk mengelompokkan *tweet* berdasarkan makna dan respon masyarakat terhadap kebijakan e-meterai tersebut. Semua *tweet* tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu sentimen positif dan sentimen negatif. Klasifikasi ini penting untuk memahami cara masyarakat merespon kebijakan yang baru diterapkan. Pengelompokan *tweet* berdasarkan maknanya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis sentimen.

Analisis sentimen adalah proses yang bertujuan untuk menganalisis pandangan atau opini seseorang mengenai suatu topik. Tugas utama analisis sentimen adalah mengklasifikasikan teks dari dokumen, kalimat, atau fitur tertentu yang bersifat positif atau negatif (Fahlevvi, 2022). Analisis sentimen juga dapat digunakan untuk

berbagai tujuan, seperti mengidentifikasi pendapat positif dan negatif tentang suatu topik (Nasukawa & Yi, 2003). Untuk melakukan analisis sentimen, diperlukan metode yang mendukung proses klasifikasi. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah *Support Vector Machine* (SVM).

Analisis sentimen dilakukan dengan menggunakan metode yang mendukung proses klasifikasi. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode klasifikasi *Support Vector Machine* (SVM). *Support Vector Machine* (SVM) adalah salah satu metode klasifikasi untuk memprediksi kelas berdasarkan pola yang diperoleh dari proses pelatihan data. Metode ini, yang dikembangkan oleh Vladimir Vapnik, bekerja dengan membentuk garis pemisah (*hyperplane*) yang memisahkan opini positif dan negatif (Santoso *et al.*, 2017). Penelitian mengenai klasifikasi sentimen menggunakan *machine learning* telah dilakukan oleh Herwinsyah dan Witanti (2022), yang melakukan penelitian tentang analisis sentimen masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 pada media sosial *Twitter/X* dengan menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM). Dalam penelitian tersebut diperoleh nilai akurasi sebesar 89%. Ratino *et al.* (2020) melakukan penelitian mengenai sentimen analisis informasi COVID-19 menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) dan *Naïve Bayes*. Pada penelitiannya diperoleh nilai akurasi untuk *Support Vector Machine* (SVM) 80,23%, dan *Naïve Bayes* sebesar 78,02%. Penelitian lainnya dilakukan oleh Yusupa dan Tarigan (2024), mengenai perbandingan algoritma *machine learning* dalam analisis sentimen mobil listrik di Indonesia pada media sosial *twitter/X*. Hasil akurasi menunjukkan bahwa *Support Vector Machine* (SVM) memiliki akurasi sebesar 75,62%, *Random Forest* 69,1%, dan *Naïve Bayes* sebesar 60,3%.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode *Support Vector Machine* (SVM) memiliki kinerja yang baik dalam klasifikasi. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini, peneliti menggunakan metode *Support Vector Machine* (SVM) untuk melakukan analisis sentimen publik terhadap kebijakan pemerintah terkait penggunaan e-meterai dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana opini publik pada *Twitter/X* mengenai kebijakan pemerintah terkait penggunaan e-meterai dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)?
2. Bagaimana hasil performa kinerja algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dalam mengklasifikasi opini publik terhadap kebijakan pemerintah terkait penggunaan e-meterai dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)?
3. Apakah topik yang sering dibicarakan dalam sentimen positif dan negatif mengenai kebijakan pemerintah terkait penggunaan e-meterai dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data dari *Twitter/X* yang dikumpulkan melalui *crawling* pada 20 Agustus – 17 September 2024 menggunakan kata kunci “E-meterai CPNS” dengan *tweets* berbahasa Indonesia.
2. Klasifikasi dibatasi hanya dua kelas yaitu kelas sentimen positif dan kelas sentimen negatif.

3. Algoritma klasifikasi yang digunakan adalah *Support Vector Machine* (SVM).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis gambaran umum opini publik mengenai kebijakan pemerintah terkait penggunaan e-meterai dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
2. Mendapatkan hasil performa kinerja algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dalam klasifikasi opini publik terhadap kebijakan pemerintah terkait penggunaan e-meterai dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
3. Mengidentifikasi topik yang sering dibicarakan dalam sentimen positif dan sentimen negatif mengenai kebijakan pemerintah terkait penggunaan e-meterai dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).